

Identifikasi Pemanfaatan Lahan Kawasan Tepi Danau Tempe

Studi Kasus: Kelurahan Salomenraleng Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo

Misran Agustiawan¹⁾, Baharuddin Koddeng²⁾, Abdul Rahman Rasyid³⁾

¹⁾Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin.

¹⁾ Lab. Perencanaan dan Perancangan Tepian Air, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

²⁾ Lab. Perencanaan dan Perancangan Wilayah, Pariwisata dan Mitigasi Bencana, Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin

ABSTRACT

Road to self-fringe land use inappropriate Tempe lake with the potential of a lake, the lake district looks much still used as a road to self land and serve as a shelter to retreat to the suitability inappropriate coastal areas. In addition, this region is also prone to flooding as a result of the occurrence of superficiality on Lake Tempe, as well as the provision of infrastructure in kelurahan still lacking.

The purpose of this study was to identify the characteristics of land use in particular suburb of Tempe Lake Village Salomenraleng, and determine the direction of regional land use banks of Lake Tempe. Results from this study, that the retreat in villages Salomenraleng generally oriented in the riverine region. It can be seen from the distance of homes of the riverine line is only 1-2 meters. The superficiality result, some parts of the lake shore, especially in the dry season to be slowly varying functions of agricultural crops and secondary food crops. Therefore the set command ie protected areas, the initial step in the development activities carried out in the coastal lake Tempe, kelurahan Salomenrelang is to give the location of protected areas. And directed the expansion of cultivation areas land capability, among others retreat, expansion of annual crops / plantation, dry land crops and farming and fishing causeway that is a top priority.

Keywords: Land use, Lake, Flood, Housing

PENDAHULUAN

Danau Tempe merupakan salah satu danau yang terletak di Kabupaten Wajo yang memiliki luas 30.000 hektar namun akibat sidentasi, luas danau tinggal 10.000 hektar. Danau Tempe merupakan tempat muara dua sungai besar yaitu Sungai Walannae dan Sungai Bila. Daerah aliran Sungai Walannae memiliki luas *catchment* area \pm 359.380 Ha meliputi bagian selatan Danau Tempe dan daerah aliran Sungai Bila memiliki luas *catchment* area 153.040 Ha meliputi bagian utara Danau Tempe (Menurut Samang dalam Ahmad Jahran, 2004).

Danau Tempe memiliki potensi sangat besar yaitu *pertama*, merupakan penghasil ikan air tawar terbesar di dunia (*Dinas Parawisata Kabupaten Wajo*), karena dasar danau ini menyimpan banyak sumber makanan ikan. *Kedua*,

merupakan salah satu obyek wisata di Sulawesi Selatan yang banyak dikunjungi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dimana ditengah-tengah Danau Tempe, tampak ratusan rumah terapung milik nelayan yang berjejer.

Selain itu, Danau Tempe memiliki potensi untuk mendukung keberlangsungan hidup manusia untuk bermukim disekitarnya. Kota Sengkang sebagai pusat kota tiap tahunnya mengalami pertambahan jumlah penduduk yang menyebabkan semakin sulitnya memenuhi kebutuhan perumahan atau tempat tinggal. Keterbatasan lahan dipusat kota menyebabkan terjadinya pergeseran pemukiman kearah pinggiran kota, wilayah yang berada di pinggiran Danau Tempe, yang memiliki potensi baik berupa area persawahan, perkebunan, dan sungai yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat.

Namun permasalahan yang terjadi di Kabupaten Wajo pada saat ini yaitu penggunaan lahan garapan pinggiran danau Tempe tidak sesuai dengan potensi sebuah danau, terlihat masih banyak daerah danau digunakan sebagai lahan garapan serta dijadikan sebagai hunian untuk permukiman yang tidak sesuai dengan kesesuaian kawasan pesisir. Selain itu, wilayah ini juga rawan terhadap bencana banjir akibat dari terjadinya pendangkalan pada Danau Tempe, serta penyediaan infrastruktur dikelurahan ini masih kurang. Hal ini masih bertentangan dengan UU No.1 tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman menjadi hak setiap warga negara untuk menempati rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

METODE PENELITIAN

Dalam penyelesaian penelitian ini, ada dua hal utama yang perlu dinilai dalam analisis ini yaitu:

1. Analisis keadaan dasar yaitu melihat karakteristik keadaan wilayah studi.
2. Analisis mengenai permasalahan pemanfaatan lahan berupapermasalahan permukiman serta ketersediaan infrastruktur dengan kaitannya dengan standar penelitian.

Adapun jenis metode analisis yang digunakan dalam pengembangan pemanfaatan lahan kawasan pinggiran Danau Tempe adalah

Model analisis deskriptif kuantitatif yang menjelaskan ketersediaan infrastruktur kedepannya, proyeksi penduduk, pertumbuhan penduduk. Metode ini nantinya akan digunakan untuk pembobotan SWOT.

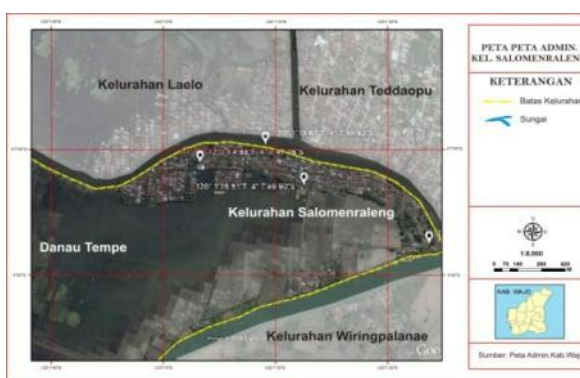
Model analisis deskriptif kualitatif menjelaskan karakteristik penduduk, karakteristik permukiman, dan permasalahan pemanfaatan ruang yang di timbulkan serta penanggulangannya.

PEMBAHASAN

Kabupaten Wajo merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan yang berjarak 190 km dari Kota Makassar, dan terbagi atas 14 wilayah kecamatan. Luas wilayah Kabupaten Wajo sekitar 2.506,19 Km², dengan rincian klasifikasi lahan terdiri atas lahan sawah 86.143 ha (34,37%) dan lahan kering 164.477 ha (65,53%).

Kelurahan Salomenraleng merupakan salah satu kelurahan yang secara administratif masuk dalam wilayah Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Letak Kelurahan Salomenraleng yang berada di sebelah selatan Kota Sengkang, berjarak 3 km dari pusat Kota Sengkang, dimana kelurahan ini dikelilingi oleh sungai yang bermuara di Danau Tempe, sehingga Kelurahan Salomenraleng tampak seperti pulau.

Kelurahan Salomenraleng memiliki banyak potensi, baik itu berupa sungai, area persawahan maupun perkebunan yang merupakan sumber mata pencaharian masyarakat.



Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi

Sumber: Google earth, diakses tanggal 5 April 2013

Permukiman

Pada umumnya permukiman di Kelurahan Salomenraleng berorientasi di pinggiran sungai, dan memiliki pola linier yaitu mengikuti garis jalan. Dan jenis rumah yang ada di Kelurahan Salomenraleng yaitu berupa rumah panggung, hal ini berkaitan budaya yaitu masyarakatnya mayoritas ber-Suku Bugis, selain itu karena kondisi alam dimana wilayah ini sering terjadi banjir, sehingga masyarakat membangun rumah yang lebih tinggi agar supaya rumah mereka tidak tergenang.

Selain itu, bagian-bagian rumah penduduk memiliki fungsi masing-masing seperti bagian kolong rumah atau bawah rumah penduduk, biasa digunakan atau difungsikan sebagai tempat untuk berkumpul, berinteraksi, bercengkraman, bahkan beristirahat dengan anggota keluarga ataupun dengan tetangga terdekat, terutama pada siang hari. Bagian bawah rumah juga digunakan untuk melakukan usaha seperti kerajinan tenung, warung, usaha kerajinan kayu, tempat ternak,

menyimpang perahu, ataupun sebagai tempat berkumpul.

Sedangkan pada bagian atap/langit-langit atau biasa disebut dalam Bahasa Bugis *Rakkeang* digunakan sebagai tempat menyimpan hasil kebun atau peralatan nelayan, dan juga sebagai tempat tinggal alternatif jika banjir meluap.



Gambar 2. Kolong rumah penduduk dan pola permukiman yang berbentuk linier
Sumber: Hasil survey 2013



mbar 3. Peta Pola Permukiman
Sumber: Hasil analisis 2013

Analisis kependudukan digunakan untuk melihat kecenderungan perkembangan jumlah penduduk Kelurahan Salomenraleng dengan melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada jumlah penduduk kelurahan ini dan melihat karakteristiknya.

Analisis tentang kependudukan pada Kelurahan Salomenraleng akan dilihat dari aspek persebaran dan kepadatan penduduk, serta proyeksi jumlah penduduk.

1. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Jumlah penduduk di Kelurahan Salomenraleng pada tahun 2008 sebanyak 1.861 jiwa dengan

kenaikan rata-rata sebesar 0,39% dari tahun 2003-2008. Jumlah penduduk terbanyak terletak di Lingkungan Bakke Alao yaitu sebanyak 1.115 jiwa sedangkan terendah terletak di Lingkungan Bakke Orai yaitu sebanyak 845 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada peta persebaran penduduk. Besarnya jumlah penduduk di Lingkungan Bakke Alao disebabkan karena wilayahnya dekat dengan kota sehingga memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan untuk kepadatan penduduk, berdasarkan luas wilayah, maka tingkat kepadatan penduduk pada Kelurahan Salomenraleng diperkirakan sebesar 6,5 jiwa/hektar dan jika dikaitkan dengan standar Internasional Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan tahun 2007, kepadatan penduduk di Kelurahan Salomenraleng masih tergolong rendah.

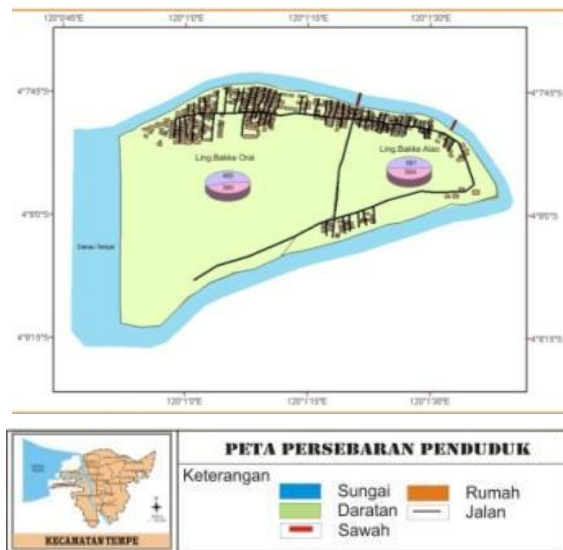
2. Proyeksi Penduduk

Proyeksi penduduk dilakukan untuk mengetahui perkembangan jumlah penduduk dan menjadi bahan acuan dalam pengambilan keputusan serta menganalisa tingkat kebutuhan sarana dan prasarana suatu wilayah. Sehingga proses dan fase-fase sebagai bagian dari tahap perencanaan dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan rencana yang ada.

Perkembangan penduduk selama 5 tahun terakhir dikawasan penelitian tahun 2007-2012 rata-rata 0,39% pertahun, pertumbuhan penduduk yang konstan ini diharapkan menjadi acuan dalam mengistemasi perkembangan dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk pada masa yang akan datang. Hal yang perlu diketahui dalam mengetahui struktur dan komposisi penduduk pada tahun dasar yaitu 2008 untuk menghitung proyeksi penduduk digunakan asumsi-asumsi sebagai berikut;

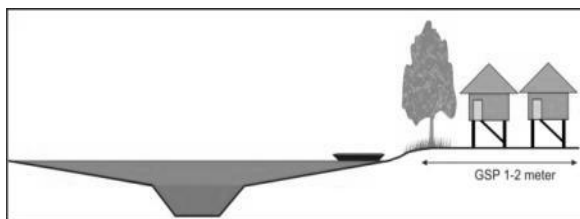
- Data penduduk yang digunakan adalah data tahun 2012.
- Proyeksi dilakukan 10 (sepuluh) tahun kedepan.
- Pendekatan perkiraan yang digunakan adalah metode linier (garis lurus). Hal ini diakibatkan karena pertumbuhan penduduk di Kelurahan Salomenraleng merupakan pertumbuhan secara alami tanpa ada proses perpindahan penduduk (migrasi).

Permukiman di Kelurahan Salomenraleng pada umumnya berorientasi pada wilayah pinggiran sungai. Hal ini terlihat jarak rumah penduduk dari ke garis pinggiran sungai hanya berjarak 1-2 meter. Jika dikaitkan dengan peraturan garis sempadan sungai (Kepres 32 tahun 1990, jarak permukiman ke pinggiran sungai antara 10-15 meter. Sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah-rumah penduduk di Kelurahan Salomenraleng masih banyak yang melanggar garis sempadan sungai.



Gambar 4. Peta Persebaran Penduduk
Sumber: Hasil Analisis 2013

Pada umumnya permukiman di Kelurahan Salomenraleng memiliki pola linier mengikuti garis jalan, dan menempati lahan-lahan berada dekat sungai. Hal ini disebabkan untuk mempermudah akses ke jalan ataupun ke tempat kerja, dan adanya ketergantungan masyarakat akan fungsi sungai yaitu sebagai tempat mencari nafka, sebagai prasarana transportasi air, dan tempat melakukan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, MCK dan kebutuhan air minum.



Gambar 5. Garis sempadan sungai permukiman Kel. Salomenraleng
Sumber: Hasil Analisis 2013

Banjir

1. Waktu Terjadinya Banjir

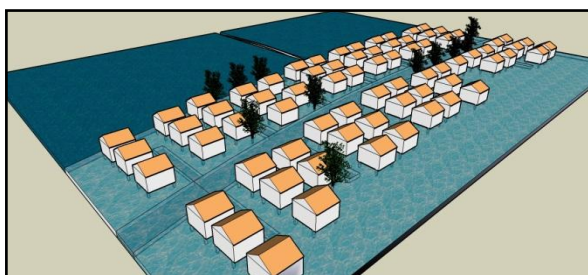
Wilayah Kelurahan Salomenraleng sering tergenang banjir, dalam kurung 10 tahun terakhir banjir setiap tahunnya melanda Kelurahan Salomenraleng kecuali tahun 2008 dan 2009.

Tabel 1. Siklus waktu terjadinya banjir

No	Tahun	Ketinggian Air
1	2007	1 meter
2	2008	2,5 meter
3	2009	1,5 meter
4	2010	1 meter
5	2011	1 meter
6	2012	2 meter

Pada tahun 2007, 2009, 2010, 2011 banjir tidak terlalu meluas, dan tinggi. Ketinggian air mencapai 1-1,5 meter, cuma sebagian permukiman penduduk yaitu Lingkungan Bakke Orai yang tergenang kolong rumahnya, hal ini diakibatkan karena jarak rumah penduduk dengan Danau Tempe agak berdekatan.

Sedangkan pada tahun 2008 dan tahun 2012 banjir sangat parah dan meluas, ketinggian air mencapai 2-2,5 meter, dimana seluruh wilayah Kelurahan Salomenraleng atau wilayah yang berada di daerah pinggiran sungai atau danau tergenang banjir. Hal ini bisa dilihat pada peta genangan banjir. Sehingga dapat dikatakan banjir yang terjadi di kelurahan ini merupakan banjir temporer, sebab tidak terjadi setiap tahun. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat tentang sejarah banjir. Wilayah Kelurahan Salomenraleng pada tahun 1950-an jarang terjadi banjir, namun akibat semakin dangkalnya Danau Tempe menyebabkan kelurahan ini sering terjadi banjir.



Gambar 6. Sketsa permukiman tergenang banjir
Sumber: Hasil Analisis 2013

Banjir yang terjadi di Kelurahan Salomenraleng pada umumnya disebabkan karena dangkalnya Danau Tempe akibat sedimentasi, dan eceng gondok, serta keadaan topografi wilayah yang relatif datar. Sehingga menyebabkan air danau sering meluap baik dari curah hujan yang tinggi maupun air kiriman dari Kabupaten Sidrap dan Kabupaten Soppeng.



Gambar 7. Peta Wilayah Genangan Banjir Tahun 2008
 Sumber : Hasil Analisis 2013



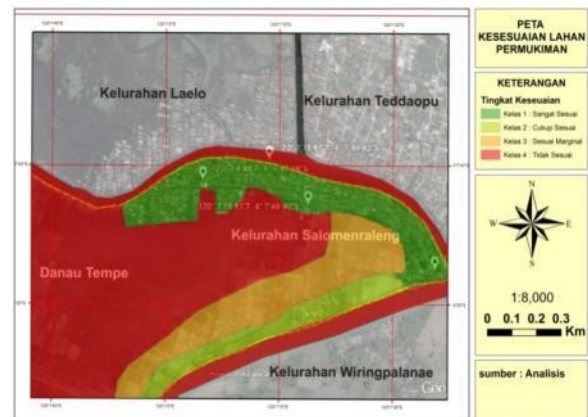
Gambar 8. Peta Wilayah Genangan Banjir Tahun 2007
 Sumber : Hasil Analisis 2013

Analisis Kesesuaian Lahan

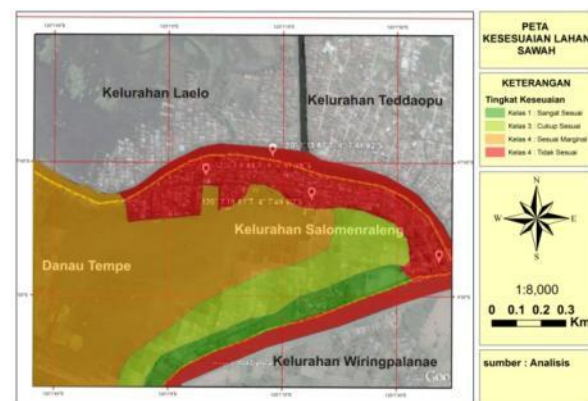
Analisis pemanfaatan lahan kawasan pesisir danau Tempe bertujuan untuk menemukan kawasan yang dapat dikembangkan menjadi kawasan budidaya dan non budidaya serta kawasan lindung. Selain itu, juga untuk mendapatkan peruntukan lahan yang digunakan sebagai dasar alokasi pemanfaatan ruang serta kecenderungan dari penggunaannya.

Permukiman di Kelurahan Salomenraleng pada umumnya merupakan rumah panggung yang memiliki pola linier, memiliki kepadatan bangunan yang rendah sekitar 1,5 bangunan/hektar dan masih banyak rumah-rumah penduduk yang melanggar garis sempadan sungai dengan jarak 1-2 meter dari pinggir sungai. Banyaknya rumah penduduk yang melanggar sungai, dapat mengakibatkan terganggunya kondisi atau kelestarian sungai, dan merusak kualitas air sungai. Selain itu, rumah-rumah penduduk rawan terhadap banjir.

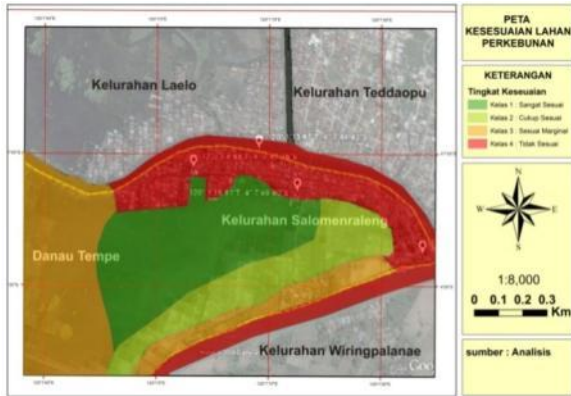
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat setempat tentang apakah mereka mengetahui adanya peraturan yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Wajo tentang garis sempadan sungai. Hampir 70% penduduk Kelurahan Salomenraleng tidak mengetahui peraturan tersebut.



Gambar 9. Peta kesesuaian lahan permukiman
 Sumber: Hasil Analisis 2013



Gambar 10. Peta kesesuaian lahan Sawah
 Sumber: Hasil Analisis 2013



Gambar 11. Peta kesesuaian lahan perkebunan
Sumber: Hasil Analisis 2013

Arahan pemanfaatan Lahan Kawasan Tepi Danau Tempe

Kawasan pesisir danau tempe memiliki kawasan yang pemanfaatan lahannya sebagian besar dijadikan kawasan agraris. Berdasarkan kepada potensi ruang yang dimiliki, potensi alam dengan mempertimbangkan kendala dan faktor kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Wajo yaitu, dijadikannya kawasan agraris.

Adapun kebijakan pemerintah kabupaten wajo untuk kawasan pesisir danau Tempe yaitu :

1. Menetapkan peruntukan lahan daerah dataran banjir pinggir Danau Tempe sebagai tegalan.

Penetapan daerah dataran banjir sebagai daerah tegalan bukan sebagai permukiman. Kebijakan pemerintah dari penetapan ini adalah Pemerintah Kabupaten Wajo tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) pada daerah rawan tergenang. Namun, belum ada yang mengatur tentang larangan membangun sehingga pemerintah tidak dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap penataan ruang di daerah tersebut. Dan masih ada masyarakat yang tetap membangun rumah tanpa harus memiliki IMB dari pemerintah.

2. Program Pemerintah Kabupaten Wajo mengenai daerah dataran banjir pinggir Danau Tempe berupa relokasi permukiman yang berada di pinggir sungai belum bisa berhasil, hal ini disebabkan karena

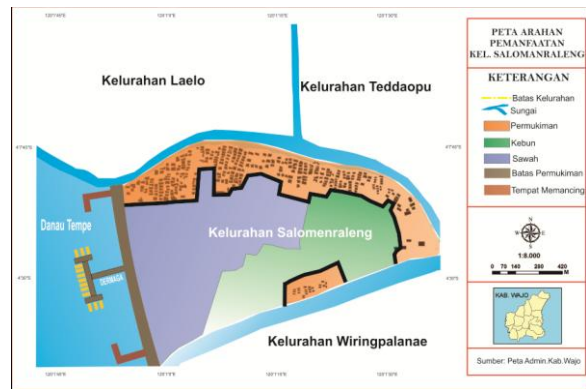
masyarakat sudah lama tinggal di wilayah ini dan sudah memiliki ikatan yang kuat, sehingga mereka tidak mau di pindahkan.

3. Menetapkan bahwa pengelolaan kawasan pinggir danau Tempe dapat dikelola oleh masyarakat apabila, air danau sedang surut dan air danau sedang pasang.

Dari kebijakan serta arahan pemerintah diatas maka arahan penataan ruang yang diberikan adalah dengan menetapkan tiap fungsi kawasan dengan mempertimbangkan pengarah kegiatan-kegiatan manusia. sehingga pola ruang yang terbentuk sesuai dengan kondisi fisik dan potensi kawasan.

Pengembangan kawasan dilakukan dengan pendekatan ekologis dalam upaya penerapan *Eco Development Control*. Dalam penerapannya, diperlukan penetapan tiap fungsi kawasan yang akan direncanakan serta besaran ruang yang dibutuhkan.

Penetapan tersebut akan memberikan batasan yang jelas tentang pola dan lokasi pemanfaatan lahan sesuai dengan kebutuhan dalam hal ini kaitannya dengan pemanfaatan lahan kelurahan salomenraleng.



Gambar 12. Peta Arahan Pemanfaatan Lahan
Sumber: Hasil Analisis 2013

KESIMPULAN

Arahan penataan ruang di kawasan Tepi Danau Tempe dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. Arahan Penataan ruang di Kawasan Tepi Danau Tempe

Fungsi	Tujuan Penetapan
Permukiman	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk pengembangan hunian dengan kepadatan yang rendah di wilayah perencanaan. Merefleksikan pola-pola pengembangan yang diinginkan masyarakat pada lingkungan hunian yang ada dan untuk masa yang akan datang
Komersil	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk menampung kegiatan perdagangan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Memperjelas keberadaan kawasan perdagangan dan jasa, meliputi: dimensi, intensitas, dan pengembangan yang diinginkan masyarakat.
Transportasi	<ol style="list-style-type: none"> Menyediakan lahan untuk pengembangan prasarana transportasi Menjamin kegiatan transportasi yang berkualitas tinggi, dan melindungi penggunaan lahan untuk prasarana transportasi.
Ruang Terbuka Hijau	<ol style="list-style-type: none"> Zona yang ditujukan untuk mempertahankan / melindungi lahan untuk rekreasi dil luar bangunan, sarana pendidikan, dan untuk dinikmati nilai-nilai keindahan visualnya Preservasi dan perlindungan lahan yang secara lingkungan hidup rawan/ sensitive. Diberlakukan pada lahan yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka, atau lahan perorangan yang pembangunannya harus dibatasi untuk menerapkan kebijakan ruang terbuka, serta melindungi kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan publik.
Kawasan	<ol style="list-style-type: none"> Memelihara dan mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

Fungsi	Tujuan Penetapan
Lindung	<p>dan mencegah timbulnya kerusakan lingkungan hidup</p> <ol style="list-style-type: none"> Mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup dan melestarikan fungsi lindung kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan cagar budaya dan kawasan lindung lainnya, serta menghindari berbagai usaha dan atau kegiatan kawasan rawan bencana. Mempertahankan keanekaragaman hayati, satwa, dan keunikan alam.
Kawasan Periwisata	<ol style="list-style-type: none"> Kegiatan menikmati pemandangan yang didukung oleh pemandangan disekitar Danau Tempe yang masih alami yang merupakan daya tarik wisata paling menarik di Kelurahan Salomenraleng. Menikmati suasana pada pesisir Danau Tempe, adanya Rumah Terapung serta Ketersediaan Tempat Pemancingan.

Sumber: Hasil Analisis, 2013

DAFTAR PUSTAKA

Budiman. 2009. Studi Pemanfaatan Lahan Kawasan Pesisir Pantai Kecamatan Tg. Palas Timur Kab. Bulungan. Jurusan teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas 45 Makassar.

Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum, Perencanaan desa.

Hertanti, Andi. 2011. Perbandingan Komposisi Jenis, Cath Per Unit Effort (CPUE), Jurusan Perikanan Universitas Hasanuddin, Makassar.

Naing, Naidah. 1999. Studi Pemukiman Kumuh Untuk Mendukung Program Relokasi Pemukiman di Kawasan Sungai Walanae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo.PPW, Unhas.

Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan, Departemen Pekerjaan Umum, 2002, Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor: 327/KPTS/M/2002, Lampiran V.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 63/ PRT/ 1993 Tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai Dan Bekas Sungai.

Poli, S. 2004. Ruang dan Kegiatan Pengembangan Kota. PSKMP Universitas Hasanuddin. Makassar 2004.

Revisi RUTR dan Penyusunan RDTR Kota Sengkang tahun 2011-2012

Sinulingga, B.D. 2005. Pembangunan Kota, Tinjauan Regional dan Lokal. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Suprijanto, Iwan. 2003, Laporan Penelitian : Karakteristik Spesifik, Permasalahan dan Potensi Pengembangan Kawasan Kota Tepi Laut/Pantai (coastal city) di Indonesia. diakses tanggal 6 Mei 2009.

Tarigan, Robinson. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah, Edisi revisi. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara

SNI (Standar Nasional Indonesia) Tahun 2004 Tentang Sarana dan Prasarana.

Undang-Undang No.1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman

Undang-Undang No.26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang